

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA

NPM : 0871010046

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PENERAPAN PIDAN MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

Oleh:

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA  
NPM. 0871010046

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani, SH., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Sutrisno, SH.,M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Yana Indawati, SH.,M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Subani, SH.,M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PIDAN MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

Oleh:

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA  
NPM. 0871010046

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal :

Pembimbing Utama Menyetujui, Tim Penguji :

1.

Subani, SH., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Sutrisno, SH.,M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Yana Indawati, SH.,M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Subani, SH.,M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

Disusun Oleh :

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA  
NPM. 0871010046

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi :

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Subani, S.H., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Yana Indawati, SH.,M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PENERAPAN PIDAN MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

Oleh:

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA  
NPM. 0871010046

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 08 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani, SH., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Sutrisno, SH.,M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Yana Indawati, SH.,M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Subani, SH.,M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PIDAN MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

Oleh:

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA  
NPM. 0871010046

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal : 08 Juni 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani, SH., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Sutrisno, SH.,M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Yana Indawati, SH.,M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Subani, SH.,M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

Disusun Oleh :

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA  
NPM. 0871010046

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi :

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing pendamping

Subani, S.H., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Yana Indawati, SH.,M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PENERAPAN PIDAN MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

Oleh:

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA  
NPM. 0871010046

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani, SH., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Sutrisno, SH.,M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Yana Indawati, SH.,M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Subani, SH.,M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PIDAN MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

Oleh:

RANDY PIANGGA BASUKI PUTRA  
NPM. 0871010046

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal :

Pembimbing Utama Menyetujui, Tim Penguji :

1.

Subani, SH., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Sutrisno, SH.,M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Yana Indawati, SH.,M.Kn.  
NPT. 3 7901 07 0224

Subani, SH.,M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randy Piangga Basuki Putra  
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 22 November 1989  
NPM : 0871010046  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Dsn. Jabon, Prambon, Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA “Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,  
PEMBIMBING UTAMA

Surabaya, 05 Juni 2012  
PENULIS

Subani, S.H.,M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Randy Piangga Basuki Putra  
NPM. 0871010046

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “ Penerapan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/198 )“.

Meskipun telah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk tidak membuat banyak kesalahan dalam menyusun skripsi ini, namun dalam kenyataannya tidak dapat dihindari. Dan penulis harapkan segala kekurangan dan kesalahan dapat disempurnakan untuk masa selanjutnya.

Semua keberhasilan skripsi ini dicapai tidak lepas dan tidak terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Haryo Sulistyantoro,S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang ramah dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa ataupun saran kepada mahasiswa.
2. Bapak Sutrisno,S.H.,M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur yang selama ini memberikan motivasi dan serta masukan-masukan yang sangat membangun.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut sukarno selaku Wadek II UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Subani, S.H, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur dan juga sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selama ini memberikan masukan-masukan yang sangat baik.
5. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak memberikan motivasi-motivasi.
7. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan Bekal Ilmu Pengetahuan.
8. Seluruh bapak / Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Untuk kedua Orang Tua dan Kakak Adik yang selalu memberikan dukungan dan doa di setiap langkah penulis kerjakan.
10. Untuk Renita Deisyane S. yang selalu mensupport setiap langkah penulis lakukan.

11. Untuk saudara Temon, Obi, Tedjo, Bbg, Pentol, Taufiq, Said, dan seluruh kawan-kawan se-angkatan tahun ajaran 2008.
12. Berbagai Pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.

Semoga harapan penulis bermanfaat bagi pembaca, apabila terdapat kekurangan yang masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Randy Piangga Basuki Putra

Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 22 November 1989

NPM : 0871010046

Konsentrasi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui data primer. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa deskriptif. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Masalah pidana mati merupakan salah satu masalah yang berskala nasional maupun internasional yang menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Dengan pidana mati, diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi penjahat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan pidana mati ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, diantaranya dilihat dari pertimbangan secara hukum, aturan-aturan, unsur-unsur dari aturan, dan dilihat dari aspek keagamaan.

Kata Kunci : Pidana Mati, Bersifat Khusus dan Alternatif, Sistem Pemidanaan, Pertimbangan Hakim

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.5.1. Pengertian Hukum Pidana.....	10
1.5.1.1. Tujuan Hukum Pidana.....	15
1.5.2. Tujuan Pemidanaan.....	16
1.5.3. Teori Pemidanaan.....	16
1.5.4. Hukuman Mati Dilihat Dari Sistem KUHP.....	27
1.5.5. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa.....	29
1.6. Metode Penelitian.....	31

1.6.1. Pendekatan Masalah.....	31
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	31
1.6.3. Bahan Hukum Primer.....	31
1.6.4. Bahan Hukum Sekunder.....	32
1.6.5. Bahan Hukum Tersier.....	32
1.6.6. Metode Pengumpulan Data.....	32
1.6.7. Metode Analisa Bahan Hukum.....	32
1.7. Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB II BENTUK PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KUHP</b>	
<b>DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 A DAN 28 I AYAT ( 1 )</b>	
<b>UUD 1945.....</b>	<b>36</b>
2.1. Penjatuhan Pidana Mati Menurut KUHP Beserta Gambaran	
Kasus Pidana Dengan Putusan Pidana Mati.....	36
2.2. Penjatuhan Pidana Mati Dikaitkan Dengan Hak - Hak	
Terdakwa.....	40
2.3. Analisa Pidana Mati Dalam KUHP Dikaitkan Dengan Pasal	
28 A dan 28 I Ayat (1) UUD 1945 .....	41
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENJATUHAN</b>	
<b>PIDANA MATI MENURUT KUHP.....</b>	<b>46</b>
3.1. Pertimbangan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana	
Mati Berdasarkan Teori-Teori Pemidanaan .....	46
3.2. Pertimbangan Hukum Dalam Penjatushan Pidana	
Mati Dikaitkan Dengan KUHP.....	48



3.3. Analisa Pertimbangan Hukum Yang Diberikan Oleh Hakim	
Dalam Penjatuhan Pidana Mati Atas Kasus Dalam	
No. Putusan 80/Pid.B/1988.....	49
BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Surabaya
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
- Lampiran 4 : Jurnal Ilmiah
- Lampiran 5 : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
- Lampiran 6 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya (Banding)
- Lampiran 7 : Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)
- Lampiran 8 : Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)
- Lampiran 9 : Permohonan Grasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanyatetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.<sup>1</sup>

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Asmara Nababan Mengemukakan, “Sudah saatnya esensi dari perubahan konstitusi ini diperdebatkan. Apa masih layak kita menghukum

---

<sup>1</sup> M. Zen Abdullah, Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009. h.61

mati seseorang bila UUD 1945 sebagai hukum tertinggi Negara ini menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>2</sup>

Timbulnya kontroversi mengenai pidana mati juga diperdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana harus diubah atau dibenahi. Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang sangat serius. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. Ada dua pandangan yang muncul. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jerah bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan.

---

<sup>2</sup>[http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=140](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140).di akses pada jam 10.00 WIB, tanggal 04-04-2012

Ada beberapa Perundang-undangan dalam pidana khusus yang menerapkan sanksi pidana mati, diantaranya :

1. Dalam UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dijatuhkan. Penjelasan Pasal 2 (2) menyatakan, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberantas bagi pelaku tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
2. UU RI No 22 tahun 2007 tentang Narkotika, yaitu pada :

Pasal 80 (1)a yang menyatakan ,” Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.-(satu milyar rupiah).

Pasal 80 (2), Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a didahului dengan permufakataan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 80 (3), Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 81 ayat (3)a, apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan

pidan mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 9empat milyar rupiah).

Pasal 82 ayat (1)a, barangsiapa tanpa hak dan melaewan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 82 ayat (1)b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (1)c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (2)a, Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (3)a. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

### 3. UU RI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu pada :

Pasal 59 ayat (2), Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu pada :

Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8, Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 setiap orang yang :

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau merusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengaman penerbangan, atau mengagalkan pekerjaanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru.
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.
- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara.
- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak.
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yng dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah

yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan.

- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan.
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.
- k. Melakukan bersama – sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.
- m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan.
- n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan di tempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan.
- o. Melakukan secara bersama – sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan, lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n.
- p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan.
- q. Didalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara, dalam penerbangan.
- r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9, setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi,



atau sesuatu bahan peledak dan bahan – bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak – hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Pasal 14, setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16, setiap orang diluar wilayahnya Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12.

5. UU No 36 tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia, yaitu pada :

Pasal 36, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a,b,c,d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a,b,c,d,e atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duas puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41, percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, atau pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40.

Pasal 42 ayat (3), perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 40.

Negara yang menentang pidana mati dewasa ini berjumlah 111 negara sedangkan yang masih mempertahankan berjumlah 84 negara. Alasan penghapusan pidana mati di negara-negara tersebut bervariasi. Sebagian menghapus dari sistem hukum pidananya karena ada pengertian yang lebih luas tentang arti hak asasi manusia. Seorang hakim Constitutional Court di Afrika Selatan melarang pelaksanaan pidana mati dalam konstitusi baru dan menyebut hak atas hidup sebagai hak-hak yang paling terpenting dari semua hak asasi manusia dan ini harus ditunjukkan oleh negara dalam semua tindakannya termasuk cara menghukum kriminal. Sebaliknya ada juga Negara yang pernah menghapus dan memberlakukan lagi seperti Filipina, Nepal, Papua Nugini, dan Rusia.

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garafalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah :

1. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.
2. Sebagai Perwujudan pembalasan.
3. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
4. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacauan dalam penjara.
5. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.<sup>3</sup>

Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Nederland dibentuk suatu panitia aksi penentang terhadap terpidana mati

---

<sup>3</sup> <http://www.lawskrpsi.com.op.cit.>

yang diketuai oleh P.J. Meertens yang telah mengajukan tujuh alasan dasar penolakan terhadap terpidana mati; yaitu:

1. Jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana mati sudah dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi.
2. Suatu pidana yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak narapidana tidak dapat diterima.
3. Mengenakan lagi terhadap pidana mati berarti kemunduran dalam kebudayaan.
4. Pidana mati pada umumnya menyebabkan para waris lebih menderita daripada narapidana sendiri.
5. Ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasional-sosialis dipidana mati banyak orang akan gembira terhadap berlangsungnya jiwa nasional-sosialis.<sup>4</sup>

#### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan pidana mati dalam KUHP dikaitkan dengan Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) Undang –undang Dasar 1945 ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum dalam Penjatuan Hukuman Mati ditinjau dari KUHP ?

#### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikaitkan dengan Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum dalam Penjatuan Hukuman Mati ditinjau KUHP.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian adalah:

---

<sup>4</sup> <http://www.lawskripsi.com.ibid..>

1. Untuk memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana dalam penjatuhan pidana mati.
2. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia.

## 1.5. Kajian Pustaka

### 1.5.1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancamannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>5</sup>

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 60

<sup>6</sup> Gunadi Ismu dan Efendi joenadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011. h.40

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yangdilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>8</sup>

Adapun juga pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli, antara lain :

1. Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
2. WLG. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002. h.1

<sup>8</sup>Priyatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. 2006. h.7

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan –keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana materiel).

3. WFC. Hattum, hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.
4. WPJ. Pompe, hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.
5. Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>9</sup>

Selain pendapat tersebut, Teguh Prasetyo membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu ahli hukum pidana dari Barat dan ahli hukum pidana Indonesia:

#### A. Ahli Hukum dari Barat :

1. Pompe, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Apeldorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian obyektif dan bagian subyektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiel ditegakkan.
3. Hazewinkel Suringa, membagi hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan

---

<sup>9</sup> Effendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung. h. 7-8

yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier dan subyektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

#### B. Ahli Hukum Indonesia

1. Moeljatno, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menngadakan dasar-dasar aturan untuk (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan (c) menenntukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu: Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan Hukum Pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Sudarto, menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.<sup>10</sup>

Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>10</sup> Effendi Erdianto, *Ibid.* h.8-9

hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan.

Dengan beralihnya hukum pidana menjadi hukum publik, maka negara yang mengambil alih urusan jika ada seseorang warga negara menjadi korban suatu kejahatan. Ketakutan seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain, bukan karena takut atas kekuatan orang yang menjadi korban, tetapi ketakutan akan diberi sanksi hukum yang akan diberikan oleh negara. Jika seseorang menyakiti seorang warga negara, maka yang akan berhadapan dengan negara. Disinilah tampak bahwa negara melindungi warga negaranya melalui sarana hukum, yaitu hukum pidana. Makin hebat suatu negara akan semakin terlindungilah warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, tetapi jika semakin lemah suatu negara maka makin rapuh pula perlindungan hukum atas warga negaranya.

Berdasarkan ciri hukum publik tersebut, maka dapat dicirikan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu:

1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan.
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.
3. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perorangan yang dirugikan), melainkan pada umumnya, negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.



4. Hal subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.<sup>11</sup>

#### 1.5.1.1 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi prefentif/pencegahan)
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif).<sup>12</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram, aman dan untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Pihak pendukung dan penentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru.

---

<sup>11</sup> Effendi Erdianto, Op.Cit. h. 46-47

<sup>12</sup> Yulies Tiena Masriani, Op.Cit. h.61

### 1.5.2. Tujuan Pidana

Masalah pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah. Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain, pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.

### 1.5.3. Teori Pidana

Alasan Pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan, antara lain :

#### 1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "Fiat justitia ruat"

coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu berencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat pembalasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

## 2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pejatuhan pidana kepada si penjahat.

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu :

- a. Untuk menakuti, teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman – hukuman harus diberikan seberat – beratnya dan kadang – kadang merupakan siksaan.
- b. Untuk memperbaiki, hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (Speciale Prevensi/ pencegahan khusus).
- c. Untuk melindungi, tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan – perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari

perbuatan – perbuatan jahat orang itu (Generale Prevensi/ pencegahan umum).

### 3. Teori Gabungan

Pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kapuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Dari beberapa alasan pemidanaan dalam teori-teori diatas, dapat diuraikan juga dari teori kehendak dan teori membayangkan. Teori kehendak yang mengatakan bahwa “sengaja“ adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan teori membayangkan, yang mengatakan sengaja apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut).

Para ahli hukum yang menganggap sama antara niat dengan kesengajaan antara lain Jonkers, Van Hattum, Hazewinkel-Suringa, Simons, Wirjono Prodjodikoro, dan Satochid Kartanegara. Pada umumnya para pakar menganut pendapat bahwa ang dimaksud dengan niat dalam percobaan (poging) adalah kesengajaan dalam arti luas, pendapat ini demikian dianut antara lain oleh Hazewinkel-Suringa, Van Hamel, Van Hattum, Jonkers, dan Van Bemmelen. Berbeda

---

<sup>13</sup> Effendi Erdianto, Op.Cit. h.141-145

dengan pendapat sarjana lainnya, Vos menyatakan bahwa jika niat disamakan dengan kesengajaan, maka niat tersebut hanya merupakan kesengajaan sebagai maksud saja. Moeljatno memberikan pendapat hubungan niat dan kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul, disinilah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan. Sama halnya dalam delik yang telah selesai.
- b. Tetapi apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu “subjektif onrechts-element”.
- c. Oleh karena itu tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka isi niat itu jangan diambil dari isinya kejahatan apabila kejahatan timbul. Untuk itu perlu ada pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan.

Dalam doktrin hukum pidana, menurut tingkatannya ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) disebut juga kesengajaan dalam arti sempit.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij mogelijkeids) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkeids bewustzijn) atas suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan dolus eventualis.<sup>14</sup>

Dari apa yang dikemukakan para sarjan diatas, pembicaraan tentang niat dalam percobaan melakukan tindak pidana adalah tentang suatu kesengajaan bukan berhubungan dengan kelalaian. Dalam kelalaian, dapat dikatakan bahwa pelaku tidak memperhitungkan atau tidak menginginkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Terjadinya

---

<sup>14</sup> Effendi Erdianto, Op.Cit. h. 165-166

suatu tindak pidana dengan kelalaian sudah dapat dipastikan bahwa itu tidak dilakukan dengan niat. Dengan demikian, tidak mungkin ada suatu percobaan atas terjadinya suatu kelalaian.

Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pidanaaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pidanaaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pidanaaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.<sup>15</sup>

Pengertian Pidana Mati dapat diartikan bahwa suatu permasalahan yang sangat mendasar dan seyogianya jangan dikaitkan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Sekali dikaitkan pidana mati berdasarkan apakah perbuatan itu sangat kejam, kurang, atau tidak sadis, kurang, atau tidak berperikemanusiaan, kurang atau tidak dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pidana Mati Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati,

---

<sup>15</sup> <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>, Op.Cit, h.4

<sup>16</sup> J.E.Sahetapy. Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.h.119-120

ditumbuk kepalanya dengan palu dan lain-lain. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut.
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir.
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Ham), yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan.
- d. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati atau peradilan tingkat pertama.
- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.
- f. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
- g. Pelaksanaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum.
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dann harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.
- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Effendi Erdianto, Op.Cit. h.153-154

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Selanjutnya di singkat KUHP ) bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Indonesia sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari penghamba Hak Asasi Manusia, oleh karena Indonesia masih mencantumkan Pasal-Pasal tentang pidana mati dalam produk peraturan perundang-undangnya, di samping harus diakui banyak pula yang pro terhadap pidana mati.<sup>18</sup>

Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum Nasional.<sup>19</sup>

Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil.<sup>20</sup>

Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan

---

<sup>18</sup>Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2009. h.57

<sup>19</sup>Ibid. h.57

<sup>20</sup>Ibid. h.57-58



dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh adalah benar yaitu untuk membinasakan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas pidananya maupun perbaikan atas dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak mengulangi pada tindakan yang sama. Sedangkan untuk tujuan pidana mati itu sendiri selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan kejam.

Berlakunya sistem hukum dengan peradilannya secara proporsional, akan menambah kepercayaan warga masyarakat terhadap hukum. Oleh karenanya, perlu dicermati didalam sistem peradilan bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu masyarakat. Meskipun demikian, ada sejumlah asas-asas peradilan yang secara universal menjadi anutan dari berbagai masyarakat

modern dewasa ini. Dan tentu saja, juga ada hal-hal spesifik dari setiap sistem peradilan tersebut.<sup>21</sup>

Tugas peradilan pidana yang diantaranya adalah yang pertama, untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan yang ketiga, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.<sup>22</sup>

Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama. Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu harapan bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam memberikan keputusan hukumnya.

Menurut The Indonesian Human Rights Watch, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali di gunakan oleh pengadilan, antara lain :

1. Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang

---

<sup>21</sup> Mas Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. h.103

<sup>22</sup> Effendi Erdianto, Op.Cit. h.154

korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba.

3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.<sup>23</sup>

Berbicara masalah hukuman, dalam KUHP pasal 10 sudah depaparkan bahwa hukuman terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan, salah satu hukuman pokok yang kontroversial dan masih dipertahankan adalah hukuman mati. Hukuman mati di beberapa Negara modern sudah di hapuskan, adapun di Indonesia keberadaanya masih di pertahankan, dengan catatan pemberlakuannya harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam pemberian hukuman apabila hukuman pokok yang lain diperkirakan tidak bisa memperbaiki si pelaku. Biasanya dalam pemberian hukuman mati dilakukan secara selektif dan selalu di berikan hukuman alternative. Hukuman mati disebut sebagai hukuman yang kontroversial alasannya berhubungan dengan hak hidup seseorang. Hak hidup adalah salah satu hak yang paling dasar (asasi) yang diberikan tuhan kepada setiap manusia. Di Indonesia sendiri, aturan yang berhubungan dengan HAM di legalisasikan dalam UU NO 39 tentang Hak Asasi Manusia dalam UU tersebut di jelaskan bahwa pemerintah, Negara dan hukum wajib menghormati, menjunjung tinggi hak yang melekat pada setiap manusia sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan harkat dan martabat

---

<sup>23</sup> Waluyadi, Op.Cit. h.58

manusia sehingga pemberlakuannya harus selektif dan tidak boleh gegabah.

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun, setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.<sup>24</sup>

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan inderogable. Selain itu, instrumen Internasional Covenant on Civil Political Rights tetap mengakomodir hukuman mati sepanjang dipandang oleh negara anggota kovenan sebagai kejahatan yang paling serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Meski demikian, MK kemudian dalam putusan tersebut memberikan arahan agar konstruksi pidana mati ke depan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Arief Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011. h.306

- d. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
- e. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun.
- f. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
- g. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>25</sup>

#### 1.5.4. Hukuman Mati Dilihat Dari Sistem KUHP

Dalam sistem hukum yang tertuang dalam KUHP, Pidana mati adalah hukuman yang terberat dari semua yang diancamkan terhadap kejahatan yang berat, misalnya dalam :

1. Pasal 10 KUHP, Pidana terdiri dari :
  - a. Pidana Pokok :
    1. Pidana Mati.
    2. Pidana Penjara.
    3. Pidana Kurungan.
    4. Pidana Denda.
    5. Pidana Tutupan.
  - b. Pidana Tambahan :
    1. Pencabutan hak-hak tertentu.
    2. Perampasan barang-barang tertentu.
    3. Pengumuman putusan hakim.
2. Pasal 104 KUHP, “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
3. Pasal 111 ayat (2) KUHP. “Jika permusuhan itu dilakukan atau peperangan terjadi maka dijatuhkan pidana mati, atau penjara seumur hidup atau sementara selamanya dua puluh tahun.”
4. Pasal 124 ayat (3) KUHP. “Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika pembuat :
  1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, gudang persediaan perang,

<sup>25</sup> Effendi Erdianto, Op.Cit. h.156-157

atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian daripadanya; merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau bangunan tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.

2. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru hara, pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan perang.
5. Pasal 140 (3) KUHP. "Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara, selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".
6. Pasal 185 KUHP. "Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan:
  1. Jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu.
  2. Jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak.
  3. Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.
7. Pasal 340 KUHP. "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
8. Pasal 365 ayat (4) KUHP, Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan no.3;
9. Pasal 368 ayat (2) KUHP. "Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, keempat berlaku bagi kejahatan ini."
10. Pasal 444 KUHP. "Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nahkoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."
11. Pasal 479k (2) KUHP. "Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

12. Pasal 479o (2) KUHP. “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, Selanjutnya hukuman mati telah diatur dalam berbagai Peraturan perundang-undangan lainnya. Khususnya terhadap kejahatan yang dianggap sangat berbahaya, seperti pada tindak pidana terorisme, Narkotika dan Psikotropika, Korupsi, Kejahatan HAM dan KUH Pidana militer.

#### 1.5.5. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya.

Karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang, maka sangat penting bagi tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri.<sup>26</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) ditentukan bahwa tersangka dan terdakwa mempunyai hak-hak yang diberikan pada tahap penyidikan dan penuntutan.

- a. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya di ajukan kepada penuntut umum.
- b. Hak tersangka perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- d. Pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.
- e. Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- f. Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- g. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud.
- h. Hak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.

---

<sup>26</sup>Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010. h.123

- i. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya.
- j. Hak menerima kunjungan dokter pribadi.
- k. Hak menerima kunjungan keluarga.
- l. Hak menerima dan mengirim surat.
- m. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum.
- n. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan.
- o. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.<sup>27</sup>

Mengenai hak tersangka/terdakwa untuk mendapat bantuan hukum, pada pasal 114 KUHAP, sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapat bantuan hukum.

Tentang hak tersangka memberi keterangan dengan bebas para pakar sependapat bahwa tersangka tidak mau/diam/tidak mau bicara mencakup pengertian ini hanya saja menurut doktrin, tersangka /terdakwa yang tidak mau menjawab pertanyaan akan diambil kesimpulan yang merugikan tersangka/terdakwa. Dalam hal ini Mr. Wirjono Prodjodikoro mengutarakan antara lain:

“Kalau seorang terdakwa tidak mau menjawab suatu pertanyaan biasanya hakim mengambil kesimpulan dari hal tidak mau menjawab itu, yang tidak menguntungkan terdakwa. Sebab seorang yang suci hatinya, biasanya tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan apa pun juga, kecuali apabila pertanyaan mengenai hal yang sama sekali tidak tersangkut paut dengan perkara pidana yang sedang diperiksa atau apabila pertanyaan itu adalah bertentangan dengan kesopanan atau kesusilaan.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Karjadi M dan Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor. 1997. h.55-66

<sup>28</sup> Marpaung Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. h.44-45



## 1.6. METODE PENELITIAN

### 1.6.1 Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi panutan perilaku setiap orang.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran ruang lingkup tentang keadaan hukum ditempat tertentu dan pada saat ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

### 1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian ini adalah didapat dari data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 1.6.3 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan mempunyai berupa hukum positif atau berupa PerUndang-Undangan yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:

Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945:

1. Peraturan Dasar:
  - a. UUD 1945.

## 2. Perturan Perundang-undangan, yaitu:

### a. KUHP.<sup>29</sup>

#### 1.6.4 Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer ( buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik ).

#### 1.6.5 Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer, Sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 1.6.6 Metode Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari Perundang-Undangan, Putusan Hakim ataupun Ensiklopedia selanjutnya dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang ditentukan secara universal, cermat, tepat dan ketat sesuai dengan pokok masalah.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut yang hasilnya lalu ditulis dengan menggunakan sistem kartu (card sistem)

#### 1.6.7 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah ditulis dengan menggunakan sistem kartu dilakukan pengolahan dengan menyusun dan

---

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. h.31

mengklarifikasikan secara sistematis dan kuantitatif sesuai dengan pokok bahasannya dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengkajian metode deduksi deskriptif. Metode berpikir deduksi adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk selanjutnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Pengkajian deskriptif analitik adalah untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana data keseluruhan Tindak pidana ada di tempat ini. Data kasus tindak pidana mati yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 4 kasus yang dijatuhi pidana mati, diantaranya 2 kasus pembunuhan berencana dan 2 kasus Pembunuhan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sumber, Pengadilan Negeri Surabaya (Panitera Muda Pidana), 12 April 2012.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, Pendahuluan: Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kajian Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang bentuk pengaturan pidana mati dalam KUHP dikaitkan dengan pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945. Sub bab pertama mengenai penjatuhan pidana mati menurut KUHP beserta gambaran kasus pidana dengan putusan pidana mati. Sub bab yang kedua mengenai penjatuhan pidana mati dikaitkan dengan hak-hak terdakwa. Sub bab ketiga mengenai Analisa pidana mati dalam KUHP dikaitkan dengan Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945.

Bab III, menguraikan tentang pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana mati menurut KUHP. Sub bab pertama mengenai pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana mati berdasarkan teori-teori pembedaan. Sub bab kedua mengenai pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana mati dikaitkan dengan KUHP. Dan sub bab ketiga mengenai Analisa pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana mati.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan pada bab dua dan bab tiga serta berisi saran-saran atas permasalahan yang dikaitkan dalam penulisan skripsi ini.